



**PROSES BISNIS INTI DAN
PROSES BISNIS PENDUKUNG TAHUN 2021**

PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan/sasaran pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.



Proses bisnis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Proses bisnis antara satu Kementerian dengan Kementerian Lainnya

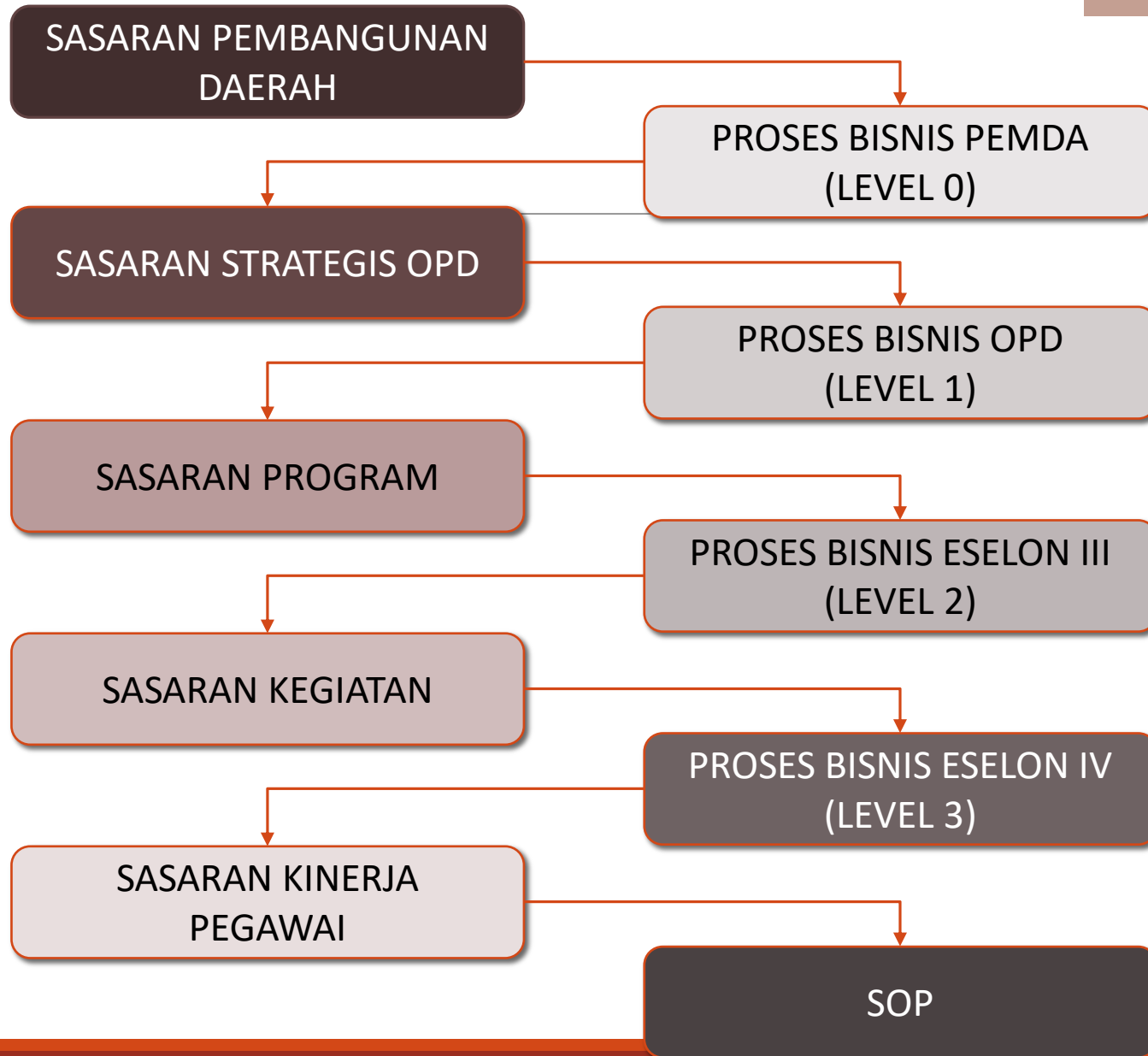
Proses bisnis antara unit organisasi eselon I dalam satu Kementerian

Proses bisnis antar unit organisasi eselon II dalam satu unit organisasi eselon I

PermenPANRB 19/2018 – Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

PermenPANRB 35/2012 - Pedoman Penyusunan SOP IP

PETA PROSES BISNIS



PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS MERUPAKAN ACUAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENGGAMBARKAN **HUBUNGAN KERJA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN** ANTAR UNIT ORGANISASI UNTUK **MENGHASILKAN KINERJA SESUAI DENGAN TUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI** AGAR MENGHASILKAN KELUARAN YANG BERNILAI TAMBAH BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN.

CASCADING BADAN PENDAPATAN DAERAH 2021

PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMEN 90/2019 Mendukung IKU Tahun 2021

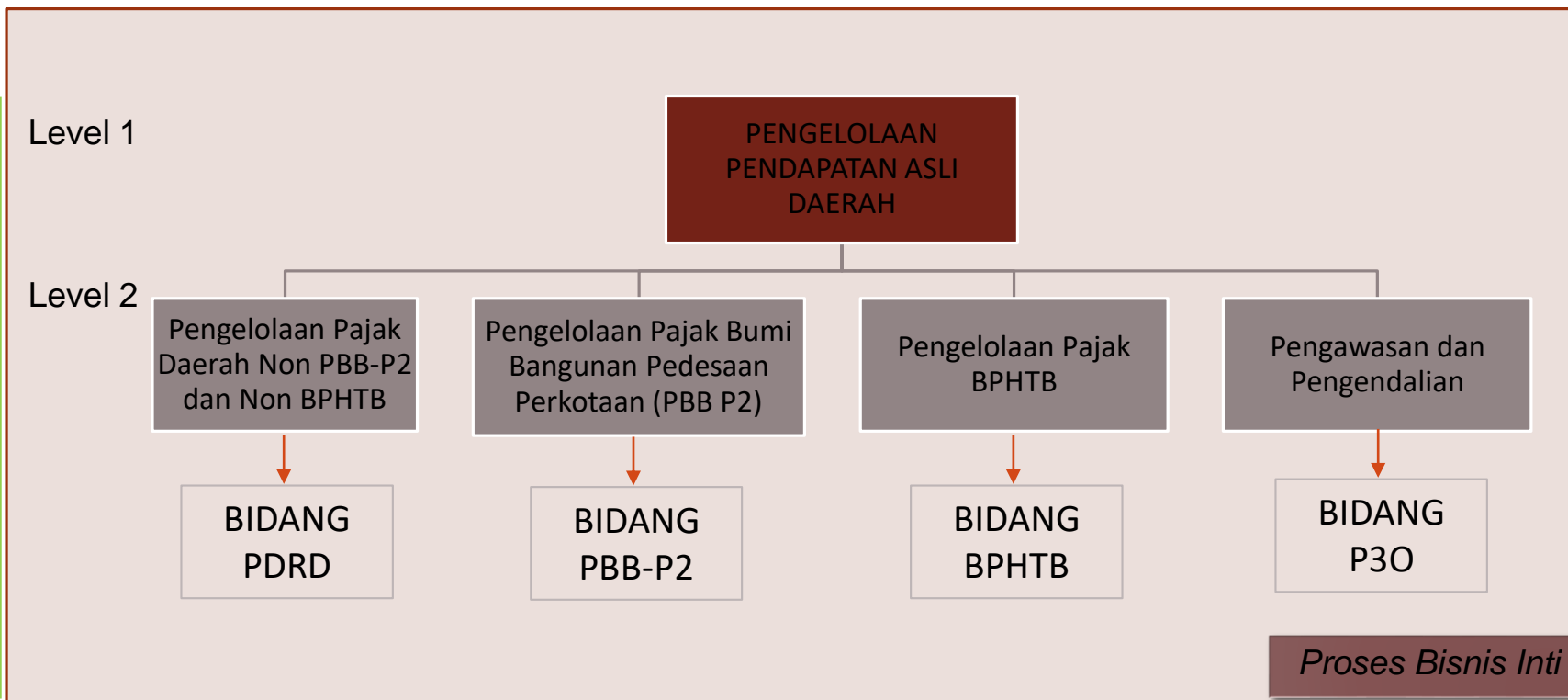
Sasaran RENSTRA	Peningkatan Rasio PAD terhadap pendapatan daerah			
IKU	Persentase tingkat Kemandirian Keuangan Daerah , target 13,74% (Realisasi PAD/Realisasi Pendapatan)%			
PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Program	Persentase Tingkat Penerimaan Pajak Daerah (Target/Realisasi)%			
KEGIATAN	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Kegiatan	Jumlah penerimaan pajak daerah non PBB dan non BPHTB	Presentase penerimaan PBB-P2 dan Rasio pelayanan PBB P2	Persentase Jumlah penerimaan Pajak BPHTB & BUMD	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
SUB KEGIATAN	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jml raperda dan SOP Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah yang di hasilkan; Jmlh sosialisasi & penyebarluasan informasi pajak daerah; Jumlah penyusunan Laporan Realisasi Pajak, Data Penghitungan serta alokasi DBH Pajak & Retribusi kepada Pemerintah Desa	Jumlah Realisasi Penerimaan PBB P2 ; Jumlah SPPT PBB p2 yang dicetak massal dan Jumlah dokumen Pelaporan Realisasi PenerimaanPBB P2	Jumlah berkas permohonan BPHTB yang terlayani dan diteliti.	Jumlah dokumen tunggakan pajak daerah non PBB; Jumlah dokumen penagihan pajak daerah non PBB ; Jumlah dokumen pencairan tunggakan pajak daerah non PBB
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak; jumlah obyek pajak yang di lakukan inten dan eksten.	Jumlah permohonan pengajuan pelayanan PBB P2 yang di proses: Jumlah pemungutan dan penagihan secara aktif dan pasif	Jumlah berkas pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan validasi	Jml dokumen penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak; Jumlah dokumen Hasil pemeriksaan Pajak Daerah.
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penilaian PBB-P2 serta BPHTB	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
	Jml Penghitungan Penetapan Penerbitan & Pendistribusian (SKPKB/SKPD) SKPKBT serta Pengembangan sistem pelayanan; Jml permintaan Perforasi & Pengadministrasian pengelolaan Benda Benda Berharga.	Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data.	Jumlah Transaksi Penerimaan BPHTB & BUMD yang di inventarisir Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD	Jml dokumen penerimaan pajak daerah & retribusi daerah; jml dokumen kajian penerimaan retribusi ; Jml kegiatan Operasi Gabungan yg dilakukan.

Proses Bisnis Level 1 dan 2 di OPD

INPUT

Kantor Bapenda
Malang dan
Kepanjen
UPT Pajak
Masyarakat

Wajib Pajak,
Objek pajak,
Regulasi,
SOP,
Standar
Pelayanan,
Kode Etik
Pelayanan,



OUTPUT

Wajib Pajak

Jasa:
-penerbitan SPTPD
-mutasi dan
penerbitan SPPT
PBB-P2
porforasi

Aplikasi
perpajakan

PENDUKUNG

Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Proses bisnis level 1 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis OPD (IKU OPD)

Proses bisnis level 2 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran program di OPD

Proses Bisnis Level 2 dan 3 di OPD

Level 2

Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan Non BPHTB (2.1)

Pengelolaan PBB P2 (2.2)

Pengelolaan Pajak BPHTB (2.3)

Pengawasan dan Pengendalian (2.4)

Level 3

Pendaftaran dan pendataan pajak daerah (3.1.1)

Penetapan pajak daerah (3.1.2)

Akuntansi dan pelaporan pajak daerah (3.1.3)

Pendaftaran, pendataan dan penilaian (3.2.1)

Pelayanan (3.2.2)

Pengolahan data dan informasi (3.2.3)

Pelayanan dan penelitian (3.3.1)

Validasi dan Verifikasi (3.3.2)

Akuntansi dan pelaporan pajak BPHTB (3.3.3)

Penagihan dan penindakan (3.4.1)

Penanganan keberatan (3.4.2)

Pengendalian operasional (3.4.3)

Proses bisnis level 2 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran program di OPD


Proses bisnis level 3 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan di OPD

SOP BAPENDA BERBASIS IT (e-SOP)



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SI Standar Operasional Prosedur(SOP) | G-SOP v.1.1



 Dashboard  **SOP**  Rekap SOP  Master

 Home / SOP BADAN PENDAPATAN DAERAH, 16 Maret 2021

DAFTAR SOP PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

[Tambah SOP](#) Jumlah SOP yang Terisi : 139

Q Tampilkan data per halaman

No ▲	Nomor SOP	Nama SOP	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Efektif	Status SOP	Status	Catatan	*
1	35.07.205.113	Pengadministrasian Data Pegawai	23/01/2017	20/01/2020	03/02/2020	Ada	Validasi	ketika ada pembaharuan terkait SOP harap menghubungi operator bagor atau pejabat yang menangani guna untuk direvisi	
2	35.07.205.113	Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Atas Pokok Pajak	14/02/2020	20/01/2020	03/02/2020	Ada	Revisi	perhatikan pada flowchat simbol ketupat belum ada arah kembali	 
3	35.07.205.114	Tata Cara Pengajuan Telaahan Staf Kepada Bupati	14/02/2017	20/01/2020	03/02/2020	Ada	Validasi	ketika ada pembaharuan terkait SOP harap menghubungi operator	

Proses Bisnis Level 3 dan SOP

Level 3	<p>PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH (3.1.1)</p>	<p>PENETAPAN PAJAK DAERAH (3.1.2)</p>	<p>AKUTANSI DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH (3.1.3)</p>
SOP	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Tata Cara Penerbitan NPWPD/NPWRD • SOP Tata Cara SIMONI • SOP Tata Cara Pendataan Online • SOP Tata Cara Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pajak Daerah • SOP Pendataan Potensi Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Tata Cara pendistribusian SKPD/SSPD • SOP Prosedur Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah (Self Assesment) dibantu Petugas • SOP Tata Cara Pendaftaran Obyek Pajak, Penetapan dan Pembayaran Pajak Daerah (Official Assesment) • SOP Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah (Self Assesment) • SOP Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah (Official Assesment) Via Badan • SOP Penyetoran Pajak (Self Assesment) • SOP Penyetoran Pajak (Official Assesment) 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah (Self Assesment) Online • SOP Tentang Tata Cara Perencanaan Potensi Pajak Daerah

Proses bisnis level 3 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan di OPD

Proses bisnis SOP adalah untuk mewujudkan pencapaian SKP

Proses Bisnis Level 3 dan SOP

Level 3	PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN (3.2.1)	PELAYANAN (3.2.2)	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI (3.2.3)
SOP	<ul style="list-style-type: none"> •SOP Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Individu Obyek dan Subyek PBB-P2 •SOP Tata Cara Verifikasi Lapangan •SOP Tata Cara Penerbitan surat himbauan pendaftaran objek & subjek PBB-P2 •SOP Tata cara pemantauan Kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 •SOP Tata cara penelitian hasil keluaran berupa SPPT/STTS/DHKP BBBP2 •SOP Tata Cara Pendaftaran OP baru dengan penelitian kantor •SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Salinan SPPT/SKPD/STPD •SOP Tata cara penyelesaian mutasi Objek & Subyek PBB P2 •SOP Tata Cara Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti (BDNPP) •SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembedulan SPPT/SKPD/STPD 	<ul style="list-style-type: none"> •SOP Tata Cara Pelayanan PBB-P2 •SOP Tata Cara Pembayaran PBB-P2 di Bank Tempat pembayaran •Tata Cara Pembayaran PBB-P2 melalui petugas tempat pembayaran PBB-p2 •SOP Tata Cara pembuatan laporan penerimaan PBB P2 •SOP Tata Cara Monitoring & Evaluasi PBB •SOP Tata Cara Pembuatan Laporan Tribunal Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan PBB •SOP Tata Cara Penyelesaian Atas Pembetulan Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 •SOP Tata Cara Penyelesaian Pengurangan PBB-P2 Terutang 	<ul style="list-style-type: none"> •SOP Tata Cara Pembentukan Data Awal Obyek dan Subyek PBB-P2 •SOP Tata Cara Pembuatan Peta Desa/Kelurahan •SOP Tata Cara Pembentukan Basis Data Peta Digital •SOP Tata Cara Penyelesaian Keberatan PBB-P2 •SOP Tata cara Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR •SOP Tata Cara Pembuatan daftar biaya komponen Bangunan (DBKB) •SOP Tata Cara pemeliharaan Data Obyek dan Subyek PBB P2 •SOP Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 •SOP Tata Cara Pembuatan Laporan Penerimaan PBB-P2 •SOP Tata Cara penentuan kembali jatuh tempo PBB P2 •SOP Tata Cara Laporan Penyampaian SPPT PBB-P2

Proses bisnis level 3 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan di OPD

Proses bisnis SOP adalah untuk mewujudkan pencapaian SKP

Proses Bisnis Level 3 dan SOP

Level 3	<p>PELAYANAN DAN PENELITIAN (3.3.1)</p>	<p>VERIFIKASI DAN VALIDASI (3.3.2)</p>	<p>AKUNTANSI DAN PELAPORAN PAJAK BPHTB (3.3.3)</p>
SOP	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Cara Pengisian SSPD dan Penghitungan BPHTB Dalam hal pengurusan pemindahan Hak Melalui PPAT • SOP Pembayaran SSPD BPHTB • SOP Penelitian Kantor • SOP Pengurusan BPHTB • SOP Penyerahan Lembar SSPD BPHTB Tervalidasi 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pengurusan BPHTB Melalui Aplikasi e-BPHTB • SOP Klarifikasi Hasil Penelitian (Kantor/Lapangan) • SOP Penelitian Lapangan • SOP Validasi SSPD BPHTB 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan Data Transaksi BPHTB

Proses bisnis level 3 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan di OPD

Proses bisnis SOP adalah untuk mewujudkan pencapaian SKP

Proses Bisnis Level 3 dan SOP

Level 3	<p align="center">PENAGIHAN DAN PENINDAKAN (3.4.1)</p>	<p align="center">PENANGANAN KEBERATAN (3.4.2)</p>	<p align="center">PENGENDALIAN OPERASIONAL (3.4.3)</p>
SOP	<ul style="list-style-type: none"> •SOP Tata Cara Penagihan Piutang Pajak Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> •SOP Tata Cara Pengurangan Keringanan dan Pembebasan atas pokok Pajak •SOP Tentang Tata cara pengajuan Telaahan Staf Kepada Bupati •SOP Tata Pengajuan Permohonan Keringanan •SOP Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> •SOP Tata cara Pelaksanaan Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah •SOP Tata Cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pajak Daerah(Monitoring/Pemantauan Kegiatan) •SOP Tata Cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pajak Daerah(Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah •SOP Tata Cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pajjak Daerah (Rekonsiliasi PAD pada OPD Penghasil) •SOP Tata cara Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Pajak Daerah(Rekonsiliasi Piutang/Tunggakan Pajak Daerah di UPT Pendapatan)

Proses bisnis level 3 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan di OPD

Proses bisnis SOP adalah untuk mewujudkan pencapaian SKP

Proses Bisnis Level 3 dan SOP

Level 3

SOP

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- SOP Pengagendaan Surat Masuk
- SOP Pembuatan Undangan Rapat
- SOP Penyusunan DUK
- SOP Pengajuan Cuti
- SOP Pengusulan Kenaikan Berkala
- SOP Pengusulan MPP
- SOP Pengusulan Pensiun
- SOP Pembuatan Surat Tugas
- SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
- SOP Pengadministrasian Data Pegawai
- SOP Pengisian Buku Cuti
- SOP Pembuatan Surat Perjalanan Dinas
- SOP Prosedur Pelaksanaan Apel Pagi
- SOP Pengiriman Berita Melalui Email
- SOP Pengusulan Pembuatan KARIS / KARSU
- SOP Prosedur Ijin Keluar
- SOP Prosedur Presensi
- SOP Penyusunan Jurnal Kerja
- SOP Prosedur Penentuan Pegawai yang Melakukan Pelanggaran Disiplin
- SOP Penerimaan Telepon
- SOP Pengagendaan Surat Keluar
- SOP Pengamanan Ruangan Kantor
- SOP Pengiriman Surat
- SOP Peminjaman Buku Perpustakaan
- SOP Pengembalian Buku Perpustakaan
- SOP Pembersihan Ruangan Kantor
- SOP Penyusunan SKP
- SOP Penyusunan Penilaian SKP
- SOP Pelaporan Absensi/Daftar Hadir Pegawai
- SOP Pembersihan Kendaraan Dinas
- SOP Prosedur Penentuan Pegawai yang Melakukan Pelanggaran Disiplin
- SOP Prosedur Ijin Keluar

PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- SOP Penyusunan RKA
- SOP Penyusunan Buku Perencanaan Penelitian
- SOP Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan Penelitian
- SOP Penyusunan DPA
- SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- SOP Penyusunan Penetapan Kinerja
- SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
- SOP Penyusunan Laporan Tahunan
- SOP Penyusunan LKJ
- SOP Perencanaan Kinerja
- SOP Pengukuran Kinerja
- SOP Pelaporan Kinerja
- SOP Evaluasi Kinerja
- SOP Pencapaian Kinerja
- SOP Pemantauan Kinerja
- SOP Pengumpulan Data

KEUANGAN DAN ASSET

- SOP Pengajuan SPP
- SOP Penyusunan Daftar Gaji
- SOP Penyusunan Pengawasan Mata Anggaran
- SOP Penyusunan Perubahan Daftar Gaji
- SOP Penyusunan SPJ
- SOP Pengajuan SPM
- SOP Penyusunan Laporan Bulanan
- SOP Penyusunan Laporan Semesteran
- SOP Penyusunan Buku Inventaris Barang
- SOP Penyusunan Laporan Inventaris Barang
- SOP Penyusunan Inventaris Ruangan

Proses bisnis level 3 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan di OPD

Proses bisnis SOP adalah untuk mewujudkan pencapaian SKP

TERIMA KASIH